



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGNES HARI NUGRAHENI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 479842

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 400.000.000

1. Tanah Seluas 589 m2 di KULON PROGO, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 81.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, SUZUKI SIDEKICK JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.171.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 859.106.748

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.365.777.748

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.365.777.748

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.